

Ulama dan Politik: Relasi Politik Tuan Guru Bajang pada Pemilu 2019

Muhamad Arif Royani¹ Tika Ifrida Takayasa²

Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang – Indonesia

Abstract

Political contestation in the 2019 elections is not only about the contestation of political parties, but the involvement of the Tuan Guru and Ulama regarding *ijtihad* (political thought) is a concern. The use of Political Identity in the 2019 Elections is damaging to the integration of the nation and state of Indonesia. It began with the 2017 DKI regional election contestation with the start of a demonstration in the name of the defense of religion on December 12, 2016 to try Ahok who was considered blasphemous about religion. TGB is one of the figures who supported the demonstration so that it received sympathy from the alumni brotherhood of 212. PA 212 support was stopped when TGB opposed in supporting Jokowi in the 2019 Election. As Gubernur NTB, TGB had thought according to rational choice considerations in expressing its support for Joko Widodo. Rational choice through consideration of the benefit (goodness) of the people is a priority that encompasses all Indonesian people, including NTB.

Kontestasi politik Pemilu 2019 bukan hanya perihal kontestasi partai politik saja namun keterlibatan Tuan guru dan Ulama mengenai *ijtihad* politiknya menjadi perhatian. Penggunaan politik identitas pada Pemilu 2019 yang merusak integrasi bangsa dan negara Indonesia. Hal itu dimulai dari kontestasi Pilkada DKI 2017 dengan dimulainya demonstrasi atas nama bela agama 12 Desember 2016 untuk mengadili Ahok yang dinilai menistakan agama. TGB merupakan salah tokoh yang mendukung demonstrasi tersebut sehingga mendapat simpati dari persaudaraan alumni 212. Dukungan PA 212 terhenti ketika TGB berseberangan dalam mendukung Jokowi pada Pemilu 2019. Sebagai Gubernur NTB, TGB memiliki pemikiran menurut pertimbangan pilihan rasional dalam menyatakan dukungannya kepada Joko Widodo. Pilihan rasional melalui pertimbangan kemaslahatan (kebaikan) umat adalah prioritas yang meliputi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya NTB.

Keywords: Relasi; Ulama; Politik; TGB; Pemilu

¹Korespondensi: Muhamad Arif Royani (arif.royan86@gmail.com), Kampus 2 UIN Walisongo, Jl. Prof Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang 50185.

²Korespondensi : Tika Ifrida Takayasa (tikatakayasa@walisongo.ac.id) Kampus 3 UIN Walisongo, Jl. Prof Hamka Km 3 Ngaliyan Semarang 50185.

Pendahuluan

Tuan Guru Muhammad Zainul Majdi atau yang lebih dikenal dengan Tuan Guru “Bajang” yang disingkat menjadi TGB adalah mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mempunyai segudang prestasi di dunia politik. Dalam waktu dua periode berhasil mengubah NTB menjadi Provinsi yang layak diperhitungkan. NTB sebelumnya termasuk jajaran Provinsi termiskin se-Indonesia bersama Papua, Papua Barat, Maluku, NTT, Sulawesi Tenggara, Lampung dan Kalimantan Tengah pada tahun 2008. Buruknya infrastruktur sangat memperlambat perekonomian transportasi dan pariwisata di provinsi NTB. TGB memasang target penurunan 2% setiap tahunnya yang dituangkan kedalam RPJMD 2008-2018(Wahyudi 2018,13).

Pada tahun 2008 NTB termasuk Provinsi dengan kondisi ekonomi yang kurang baik yang dipengaruhi oleh pendapatan daerah dan kondisi geografis yang tidak mendukung. Sektor pariwisata yang jauh kalah tertinggal daripada Bali sebagai tetangganya. Infrastruktur jalan yang belum layak dan pembangunan bandara yang lambat serta tingginya angka kemiskinan di NTB menjadi tantangan yang harus dipecahkan sebagai seorang pembuat kebijakan daerah. Data kemiskinan NTB tahun 2008 menunjukkan angka 23,81 persen atau setara dengan satu juta jiwa hidup dibawah garis kemiskinan. NTB termasuk salah satu dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia(Wahyudi 2018, 23).

Sepak terjang Tuan Guru Bajang dalam politik dimulai saat ia menjadi politisi pada tahun 2004 yaitu menjadi anggota DPR RI NTB melalui Partai Bulan Bintang (PBB). Pada Pemilu 2008, TGB menjadi gubernur pertama dari pemilihan langsung. Tuan Guru Bajang kemudian menjadi Gubernur termuda di Indonesia dan dipercaya kembali memimpin Provinsi NTB pada periode

keduanya tahun 2013 (Wahyudi 2018). Kemenangannya didominasi oleh faktor figur, ketokohan atau karisma seperti yang disebutkan disebut oleh Max Webber (1864-1920). Karisma adalah sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang dan mempunyai daya tarik serta karakter pribadi yang memberikan inspirasi pada mereka yang bakal menjadi pengikutnya (Johnson 1994).

Selama dua periode masa kepemimpinannya, TGB telah berhasil mengangkat NTB menjadi provinsi yang nilai pertumbuhan ekonominya termasuk terbaik skala nasional. TGB meraih penghargaan sebagai salah satu Gubernur terbaik versi Kementerian Dalam Negeri pada 2017. Hal itulah yang menjadikannya kemudian memiliki nilai tawar sekaligus daya tarik yang tinggi (Wahyudi 2018). Pembangunan Infrastruktur di NTB sejalan dengan program pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun 2014. Infrastruktur sangat penting bagi kemajuan bangsa. NTB berada di jalur strategis yang meliputi darat, laut dan udara. NTB berada di sabuk selatan yang merupakan jalur transportasi darat paling padat di Indonesia dari Banda Aceh hingga Kupang. Alur Pelayaran Internasional (API) yaitu alur selat Lombok dan Selat Timor serta lintasan ‘segitiga emas’ Bali-Komodo-Toraja berada di NTB (Wahyudi 2018).

Kontestasi politik Pemilu 2019 bukan hanya perihal kontestasi partai politik saja namun keterlibatan Tuan Guru dan Ulama mengenai ijtihad politiknya menjadi perhatian. Nama TGB mulai banyak didengar dan masuk dalam bursa Cawapres 2019 dari partai Demokrat. Sesuai dengan Hasil penelitian terbaru lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC 2018), terdapat lima nama calon wakil presiden yang paling disukai massa pemilih nasional untuk Pilpres 2019 yaitu; Gatot Nurmantyo, Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang, dan Anies Baswedan.

Tiga di antaranya Mahfud MD, TGB dan Anies Baswedan dianggap memiliki kedekatan dengan umat Islam, hal yang dianggap penting pada Pilpres 2019 (SMRC 2018).

Persaudaran Alumni 212 adalah sebuah sebutan dari kelompok dari aksi bela agama pada tanggal 02 Desember 2016. Aksi ini bermula dari gubernur DKI Jakarta (Basuki Tjahja Purnama) yang dianggap melakukan penistaan agama (Al-quran) dalam pidatonya. Aksi 212 ini menuntut agar Basuki 'Ahok' Tjahja Purnama diadili akibat kasus tersebut. TGB pun juga mengikuti aksi tersebut namun, semangat aksi 212 tidak berakhir sampai Ahok diadili (Falahudin A 2019). Aksi-aksi serupa masih dilakukan dan menjadi legitimasi baru calon yang direstui kalangan Islam populis Indonesia. Besarnya pengaruh gerakan Islam dapat diamati melalui upaya. Para politisi memobilisasi bersama identitas agama untuk menarik pemilih Muslim (Nastiti dan Ratri 2018).

Hasil rakornas PA 212 di Cibubur pada 29 Mei 2018, merekomendasikan beberapa nama calon presiden yang akan didukung pada pemilihan presiden 2019 (CNN Indonesia 2018). Beberapa nama tersebut adalah Rizieq Shihab yang merupakan pemimpin dari Front pembela Islam (FPI) disusul Prabowo Subianto, Amien Rais, Tuan Guru Bajang (TGB) Yusril Ihza Mahendra, dan Zulkifli Hasan. Menurut (Nastiti dan Ratri 2018) dalam artikelnya berjudul *Emotive Politics: Islamic Organizations and Religious Mobilization in Indonesia* menjelaskan bahwa kombinasi antara politik patronase dan pengaruh politik organisasi Islam untuk membentuk individu menjadi subyek politik yang saleh. TGB menjadi salah satu sosok yang dianggap saleh dan religious organisasi Islam PA 212 dikarenakan keikutsertaannya pada aksi tersebut. Hal itu merupakan modal sosial dan menarik suara kaum muslim yang mewakili

masyarakat non Jawa khususnya NTB untuk kontestasi Pilpres 2019.

Dukungan PA 212 berakhir ketika TGB memihak pada Jokowi pada kontestasi Capres 2019 dari pada Prabowo Subianto. Dengan hanya ada dua pilihan yang sama dengan pemilihan 2014 yang head to head menjadikan persaingan dan juga polarisasi masyarakat yang tajam sehingga menjadi konflik tidak hanya di kalangan partai politik namun eskalasi konflik mengakar sampai masyarakat bawah. Melihat fenomena tersebut maka, politik Islam kontemporer di Indonesia saat ini sangat dipengaruhi oleh "pengalaman emosional dan ekspresi" difasilitasi oleh organisasi Islam sebagai mode mobilisasi politik (Nastiti dan Ratri 2018).

Artikel ini akan membahas bagaimana kesalehan & dukungan organisasi PA 212 berubah ketika pilihan calon yang didukungnya berubah. Apakah ini mewakili pilihan masyarakat muslimin pada umumnya atau hanya penggunaan *exertion of power* berdasarkan preferensi politik kelompok tersebut saja. Artikel ini juga akan menggarisbawahi penggunaan instrumen politik identitas untuk memobilisasi dan mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Artikel ini juga akan mencoba menganalisa latar belakang preferensi politik TGB dilihat dari teori pilihan rasional.

Tuan Guru Bajang (TGB) dan Politik Identitas pada pemilu 2019.

Sejak pemilu langsung tahun 2004 tokoh politik menjadi figur yang sangat sentral dari partai politik. Kedekatan secara emosional dan psikologis akan menjadi acuan bagi pemilih, pemimpin yang Islam dan Islamis sangat penting bagi negara dengan mayoritas muslim. TGB adalah representasi pemimpin muslim ideal yang bukan hanya beragama Islam namun juga bisa merangkul semua golongan. Total pemilih di

NTB pada pemilu 2014 sebanyak 2.545.416 dan DPT 3.522.679 (KPUD NTB 2014). Suara Jokowi-JK kalah telak hanya 701.238 atau 27,54 persen dan Prabowo-Hatta 1.844.178 atau 72,45 persen pada pilpres 2014 (Dian Maharani 2014). Hal ini menjadi penting bagi para partai politik untuk mempertimbangkan ketokohan TGB di NTB untuk mempersatukan suara masyarakat Jawa dan luar Jawa.

Terjunnya Tuan Guru dalam politik praktis menjadi bukti bahwa hegemoni teologis berujung pada hegemoni sosial-politik. Politik dan agama adalah dua saudara kembar atau dua sisi dari mata uang. Agama adalah pondasi sedangkan kekuasaan adalah penjaganya. Segala sesuatu yang tidak berpondasi akan runtuh. (Majdi 2009). TGB mengambil Jalan tengah atau manhajul wasath ia tidak menginginkan penerapan agama Islam dengan sikap yang memaksakan kehendak apalagi menggunakan jalan kekerasan. Kemaslahatan (kebaikan) umat adalah prioritas yang meliputi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya NTB (Wahyudi 2018).

Pada kontestasi Pilpres 2019, Indonesia memperlihatkan fenomena menguatnya gejala politik identitas yang berwujud dengan kekerasan komunal serta rivalitas politik kekuasaan di daerah-daerah (Septi Satriani, et al 2010). Pilkada Jakarta 2017 mempengaruhi kontestasi Pilpres 2019 dikarenakan menggunakan instrumen politik identitas yang merusak sendi berbangsa dan bernegara. Isu siapa calon yang dianggap pro-umat dengan anti-umat menjadi perhitungan dalam kontestasi calon wakil presiden Indonesia. Maka nama-nama yang dari kalangan santri itu menjadi penting (SMRC 2018). Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa politik identitas adalah salah satu persoalan bangsa yang sangat besar dan massif terjadi menjelang pemilihan umum.

Indonesia merupakan suatu negara dengan potensi konflik identitas yang cukup tinggi dikarenakan sentiment primordialisme yang ditinggalkan oleh kolonialisme Belanda (Afala 2018). Menurut Horowitz konflik yang terjadi di Asia dan Afrika didorong oleh semangat *self-determination* yang disebabkan oleh sentiment etnik imbas dari Perang Dunia II (Horowitz 1985). Karl Deutch menambahkan tumbuhnya kesadaran politik masyarakat untuk mengkonsolidasikan persatuan negara dalam garis identitas yang homogen (Deutch 1961). Akibatnya masyarakat menjadi terbelah *divided Society* dan konflikual serta berakhir pada tindakan kekerasan (Afala 2018).

PA 212 disatu sisi dapat menyatukan perbedaan diantara kaum muslim di Indonesia dikarenakan mempunyai *common enemy* yaitu penista agama. Namun aksi serupa terus berlangsung ketika kasus telah usai, ini mendorong disintegrasi bangsa karena menggunakan rasionalitas kelompok garis identitas yang homogen. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip dasar negara Pancasila yang bhineka. Politik identitas di satu sisi menjadi cara membentuk persatuan dan solidaritas kelompok namun di sisi lain menjadi basis potensial bagi lahirnya konflik karena mengarah hanya pada kepentingan kelompoknya saja (Afala 2018). Kelompok identitas ini menjadi eksklusif dan bertindak dengan menggunakan rasionalitas kelompoknya saja. Pada titik ekstrim, kelompok identitas berpotensi pada munculnya konflik komunal, fanatisme dan *spartisme* yang mewarnai perjalanan politik negara Indonesia.

Sentimen primordial memainkan peran dalam menciptakan konflik dan kekerasan dalam masyarakat dimana ikatan agama dan etnis berakar kuat daripada ikatan politik kewarganegaraan (Geertz 1973). Ikatan primordial digunakan sebagai jalur konflik yang digunakan kelompok identitas tertentu untuk memperjuangkan kepentingan kelompoknya terutama pasca runtuhnya orde baru tahun

1998. Hal ini yang disebut oleh Geertz dalam bukunya sebagai usaha pernyataan kekuasaan (*Exertion of power*) dari kategori struktur yang berkontestasi sehingga politik identitas mendapatkan pembenaran dan kekerasan yang menyertainya (Geertz 1973). Jika PA 212 menggunakan agama untuk legitimasi politik dengan calon presiden yang didukungnya maka ini juga termasuk *exertion of power* yang dilakukannya untuk merebut suara pada kontestasi Pilpres 2019.

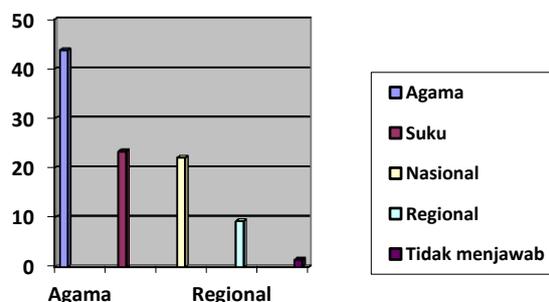
Konflik adalah sebuah penanda dari geraknya sejarah & munculnya suatu perubahan ia suatu yang inheren dari dalam diri manusia yang tidak bisa dihindari (Luria 1932). Konsolidasi akbar aksi 212 itu pun menorehkan sejarah baru sebagai demonstrasi terbesar pasca-1998. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI yang menjadi motor gerakan itu mengklaim ada tujuh juta umat Islam yang ikut serta dalam aksi tersebut. Agama adalah satu institusi politik yang paling penting dalam sistem pancasila. Para politisi mencoba memusatkan atau mencari legitimasi mereka baik secara langsung ataupun tidak melalui instrumen agama. Agama dipergunakan sebagai sumber bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat Indonesia (Zamharir 2004)

TGB merupakan salah satu dari politisi partai demokrat yang akan didukung untuk kontestasi Pilpres 2019. Sikap politik TGB disorot lantaran tidak selaras dengan partai demokrat pada kontestasi Pilpres 2019. Pada pemilu tahun 2014 TGB merupakan tim sukses dari Prabowo Subianto. Akibat berseberangan dengan partai demokrat TGB mengundurkan diri pada Juli 2018 (Abdulsalam 2018). TGB melihat bahwa setelah Pilpres 2014 terjadi perpecahan dimasyarakat akibat perbedaan pilihan, kutipan ayat-ayat perang menjadi pemicu perpecahan. TGB menyatakan bahwa khazanah keberagaman masyarakat Indonesia adalah aset paling mahal yang harus dijaga dan konteks agama Islam

seharusnya digunakan secara proporsional (Abdulsalam 2018).

Persaudaraan Alumni (PA) 212 mencoret TGB menjadi salah satu dari calon presiden yang didukungnya. PA 212 mengklaim bahwa TGB telah mempunyai catatan hitam dan berasal dari partai Demokrat dimana Ketua umum partai ini yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang telah menjebloskan pimpinan PA 212 Rizieq Shihab ke penjara (Andry 2018). TGB dianggap tidak konsisten dalam dukungannya dalam kontestasi Pilpres 2019. Hal ini sejalan dengan dengan apa yang diungkapkan (Nastiti dan Ratri 2018) sebagai ‘emotive politics’ bahwa preferensi politik organisasi Islam PA 212 hanya berdasarkan ikatan emosional. Ketokohan dan kesalehan tidak lagi digaungkan dikarenakan perbedaan pandangan politik dalam pilpres 2019.

Hal ini sangat berbeda dari sebelumnya dimana TGB dianggap tokoh yang sangat didukung karena sosoknya yang religious, mampu serta sangat berpengaruh dalam kemajuan NTB. Menurut survey Identitas agama menjadi identitas paling kuat yang ada pada diri masyarakat Indonesia (43,8%) (Media Survei Nasional 2018). Agama & Politik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan menurut masyarakat Indonesia. Namun hal itu tidak sejalan dengan dukungan masyarakat kepada TGB setelah dukungannya terhadap Jokowi. Hasil survey median menyebutkan bahwa TGB hanya meraih angka 0,2% dimana sebelumnya sebesar 2,5 persen (Media Survei Nasional 2018).



TGB berfikir siapapun yang dicalonkan maka harus dihormati dan tetap menjaga persaudaraan di tengah perbedaan politik pada Pemilu 2019. (Andry 2018). Menurutnya urusan politik yang merupakan agenda rutin lima tahunan tidak boleh mengalahkan silaturahmi maka akal sehat dan akhlaq harus digunakan. Ulama bukan hanya yang ahli dalam agama, tetapi juga mempunyai integritas untuk mendakwahkan Islam yang baik dan ramah. Maka seharusnya perwakilan ulama bukan hanya meraih simpati masyarakat dan mendukung capres dengan visi misi yang sama hanya untuk kepentingan politik saja. Gerakan PA 212 yang menggunakan instrumen politik identitas bisa jadi hanyalah pertarungan politik yang dimainkan oleh elit-elit politik yang merusak disintegrasi bangsa (Klinken 2007).

Pilihan Rasional Tuan Guru Bajang (TGB) pada Pilpres 2019

Pada Pilpres 2019 lalu, masyarakat belum atau tidak bisa keluar dari politik identitas kebencian. Wajah politik di negeri ini turun sampai pada krisis etika, moral, dan sosial yang paling dasar. Masyarakat Indonesia seperti terbagi ke dalam dua golongan, putih dan hitam. Permasalahannya adalah, keduanya mengklaim sama-sama putih, sama-sama kelompok yang mengklaim paling benar. Kelompok yang mewakili rakyat suara rakyat, bahkan suara Tuhan di muka bumi ini. Politik seperti di atas tidak pernah terlepas dari pengaruh tokoh yang ada di dalamnya. Jika tokoh A berada di kelompok A, maka bagi kelompok B tokoh A adalah tokoh yang tidak punya kompetensi untuk memimpin. Begitu pula sebaliknya.

Fenomena di atas dapat dilihat dari proses pindahnya dukungan Tuan Guru Bajang (TGB) kepada Jokowi. Sebelumnya TGB dikenal sebagai seorang yang mendukung Prabowo. TGB adalah sosok tokoh yang komplis. Ia seorang politisi (umara) yang bisa dibilang sukses. Ia juga

seorang intelektual (ulama) yang diakui. Tidak heran jika kemudian banyak orang yang mengidolakannya namun juga tak sedikit yang mencelanya. Melihat arah perubahan politik TGB ditelaah menggunakan teori pilihan rasional dimana untung dan rugi 'Cost and benefit' atau menurut Axlerod disebut 'payoff' menjadi pertimbangan dalam sebuah kebijakan yang diambil seorang aktor politik (Axelrod dan Keohane 1985).

Kebijakan yang dianggap paling menguntungkan oleh suatu aktor akan diambil setelah menghitung kalkulasi untung dan ruginya. Dalam kasus ini perubahan dukungan TGB terhadap Jokowi pada Pemilu 2019 yang berbeda dengan Pemilu sebelumnya 2014. Ada tiga hal yang dapat mempengaruhi kecenderungan aktor dalam menentukan kebijakan rasional yang diambil adalah; Kepentingan bersama, bayangan masa depan dan jumlah aktor yang terlibat dalam sebuah kerjasama politik (Axelrod dan Keohane 1985). Berikut ini penjabaran pertimbangan pilihan rasional seorang gubernur dalam mengambil sebuah kebijakan dalam dukungan calon presiden 2019 :

Kepentingan Bersama (*Mutual Interest*)

Dalam hal ini TGB sebagai seorang pemimpin di NTB mempunyai kepentingan untuk menjadikan NTB lebih maju dalam hal ekonomi dan Joko Widodo sebagai seorang presiden dapat mendukung Pembangunan di NTB yang sudah dimulainya 10 tahun lalu. TGB menganggap Joko Widodo merupakan calon yang konsisten dan berkomitmen mengeksekusi rencana pembangunan di NTB (Wahyudi 2018) Hal ini merupakan sebuah pilihan rasional bagi seorang pemimpin daerah karena pertimbangan kemaslahatan bangsa dan negara. Beberapa program yang sedang berjalan yang dilakukan oleh TGB harus dipastikan terus berjalan, maka ia harus memilih visi-misi capres yang sesuai dengan kepentingan NTB pada khususnya,

perbedaan kebijakan akan menghambat pembangunan NTB yang sedang berjalan.

TGBNomics adalah serangkaian gebrakan ekonomi Islam berbasis kerakyatan yang dilakukan TGB untuk mempercepat putaran roda pembangunan daerah di NTB. TGBNomics bertumpu pada realitas ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat. TGB menitikberatkan NTB yang berdaya saing dan mengatasi berbagai penghambat perekonomian berdasarkan skala prioritas dan *clustering* (Herbawati 2018). Beberapa program yang sedang berjalan di NTB adalah pemindahan status jalan provinsi menjadi jalan nasional maka dukungan dari pusat sangat penting dan mengurangi beban APBD (Wahyudi 2018). Total 1772 jalan provinsi di NTB berhasil dinaikkan menjadi 300km jalan nasional. Kemantapan jalan nasional di NTB di tahun 2017 telah mencapai 98 % dan 83% Jalan provinsi. Transportasi jalan menjadi modal berharga untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat NTB. Sektor pariwisata & Pertanian juga sangat terbantu dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan yang didukung oleh pemerintah pusat.

Pembangunan *Lombok International Airport* (LIA) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai destinasi wisata merupakan paket pengembangan yang saling mendukung disetujui oleh pemerintah pusat karena NTB berpotensi untuk membantu target 20 Jt kunjungan wisatawan. Lonjakan wisatawan mencapai 650% semenjak didirikannya LIA sebanyak 3.500.000 wisatawan pada tahun 2017 (Wahyudi 2018). Megaprojek pembangunan pelabuhan lembar- Gili Mas sebagai pelabuhan modern sejalan dengan program pemerintahan Joko Widodo yaitu Tol laut dan menunjang pariwisata di SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora).

Tol laut adalah rute laut bebas hambatan yang menghubungkan antar pulau dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. Ini adalah program kampanye Jokowi pada Tahun 201

yang merupakan jawaban dari kesulitan NTB untuk distribusi keluar masuknya barang dari NTB. Semenjak 2017 Pelabuhan Calabai beroperasi sebagai rute tol laut nasional yang menjadi pintu masuk keluar masuknya barang di NTB (Wahyudi 2018). PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) atau PT Pelindo III telah menyelesaikan pembangunan dermaga di Pelabuhan Gili Mas yang mempunyai panjang 400 meter sehingga kapal pesiar dapat bersandar dan mempermudah wisatawan Pelindo III mendukung pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dipersiapkan sebagai kawasan pariwisata unggulan di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Gili Mas, telah mengambil peran sebagai pintu gerbang wisatawan melalui laut

Pembangunan lumbung pangan Nasional di NTB juga didukung pemerintah pusat pada tahun 2011. Pembangunan bendungan pun juga telah direncanakan menjadi 7 tahapan dari tahun 2011-2022 yang sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang dicanangkan pemerintah pusat. Total dana 3,5 Triliun rupiah telah dikucurkan pemerintah pusat untuk tiga tahap pembangunannya dan akan terus dilakukan sampai realisasi semuanya sampai tahun 2022. Produksi beras dan jagung mulai melimpah hampir menembus 2 juta ton dan menyumbang program ketahanan pangan nasional (Wahyudi 2018). MoU antara Pemda NTB dan pemerintah pusat yaitu iPasar dari Kementerian Pertanian pun dibuat untuk melindungi harga jagung di NTB.

TGB juga mendukung program swasembada padi, kedelai dan jagung yang dicanangkan oleh Jokowi. NTB menjadi penyangga utama bagi terlaksananya hal tersebut. Dana 600 miliar digelontorkan untuk mendukung rencana tersebut. Pembangunan 1000 unit took tani, perbaikan kesuburan sawah dan pembangunan gudang dan pengolah hasil panen sehingga hasil beras, kedelai dan jagung meningkat pada tahun 2015 dan sebagian diekspor ke luar negeri.

Jokowi pun secara langsung memantau program swasembada di NTB(Wahyudi 2018). Dukungan pemerintah pusat merupakan sebuah benefit atau keuntungan bagi NTB untuk mengentaskan kemiskinan. Pemerintah pusat juga mendapatkan keuntungan bagi meningkatnya perekonomian di daerah maka ini adalah sebuah pilihan yang sangat rasional bagi seorang kepala daerah.

Peningkatan Produksi Jagung NTB:

2008: 200.000 ton
2013: 700.00. ton
2017: 1.600.000 ton

Bayangan masa depan (*Shadow of The Future*)

Pelabuhan laut Bandar Kayangan yaitu kawasan multi terpadu, tempat wisata dan ragam sarana lainnya merupakan Program masa depan bagi NTB di Lombok Utara. Bandar Kayangan ditetapkan sebagai proyek besar berkelanjutan yang digarap sebagai kota baru yang menyediakan multisarana untuk meningkatkan potensi tujuan wisata kelas dunia Pemerintah pusat menangkap keseriusan dan mendukung dana yang sangat besar melihat komitmen TGB memajukan pariwisata dan perekonomian NTB (Wahyudi 2018).

Penanggulangan kemiskinan juga merupakan program jangka panjang yang harus tetap didukung oleh pemerintah pusat. Program bantuan sosial seperti Jamkesmas dan Progam Keluarga Harapan (PKH) sejalan dengan program dari pemerintah pusat. Pemberdayaan masyarakat berupa PNPM serta Pengembangan usaha berbasis unit usaha melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Hasilnya angka kemiskinan di NTB menurun dari 23,08% tahu 2008 menjadi 15,05% pada tahun 2017 sehingga meraih MDGs Awards dari Bappenas (Wahyudi 2018).

Pembangunan terintegrasi antara sektor pariwisata dan sector lainnya mempercepat KEK

Mandalika yang terdiri dari Bandara Internasional (LIA), Pelabuhan Lembar-Gili Mas, Jalan lingkaran Selatan dan Wisata Mandalika mendapat respon yang sangat positif dari pemerintahan Jokowi. Hal ini juga membantu para petani dalam memasarkan produknya. Mulusnya jalan di NTB juga dijadikan ajang balapan internasional seperti Grand Fondo New York (GFNY), Sembalun Challenge, Tour De Lombok dan NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP pada tahun 2021 mendatang.

Presiden Jokowi juga menginginkan Balapan mobil Internasional F1 bisa diadakan di Sirkuit Mandalika NTB di masa depan. World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon diraih oleh Lombok dari UEA pada tahun 2015. Kondisi NTB yang sangat religious mendukung pengembangan wisata halal ini yang menjadi sumbangan terbesar bagi perekonomian daerah. Hal ini merupakan hal yang ingin terus dijaga dimasa depan demi kemajuan ekonomi dan kemaslahatan rakyat NTB dan juga perekonomian Indonesia pada umumnya.

Jumlah aktor yang Terlibat (Number of actors)

Kontestasi politik ulang Jokowi dan Prabowo pada Pilpres 2019 tidak banyak merubah peta dukungan parpol pengusungnya pada Pilpres 2014. Perubahan terbesar terjadi pada partai Golkar selaku partai dengan perolehan suara besar yang beralih dari pendukung Prabowo pada tahun 2014 dan Jokowi pada tahun 2019. Partai baru seperti PSI (Partai Solidaritas Indonesia) dan Perindo (Partai Persatuan Indonesia) menyatakan dukungannya kepada Jokowi meskipun tidak sah dikarenakan tidak mempunyai kursi di parlemen pada pemilu sebelumnya.

Beberapa partai yang mengusung Jokowi yang disahkan oleh KPU adalah PDIP, Golkar, Nasdem, PPP, PKB dan Hanura. Jumlahnya lebih banyak dari pengusung Prabowo yaitu Partai

Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Beralihnya TGB dari Partai Demokrat kepada Golkar sejalan dengan pandangan politiknya yang berubah dari Prabowo pada tahun 2014 menjadi Jokowi pada 2019. TGB melihat bahwa Jokowi lebih berpotensi menang pada Pilpres 2019 dengan elektabilitas yang tinggi dilihat dari rilis berbagai survey (Prastivi 2019).

No	Nama Lembaga	Jokowi-Ma'ruf	Prabowo-Sandiaga
1	Center for Strategic and Internasional Studies (CSIS)	51,4%	33,3%
2	PolMark Indonesia	40,4 %	25,8%
3	LSI Denny JA	56,8%	36,8%
4	Indikator Politik Indonesia	55,4%	37,4 %
5	Indo Barometer	50,8 %	32 %
6	Roy Morgan Australia	56,5%	43,5%

Dari rilis liputan6.com (Prastivi 2019)

TGB merupakan figur yang rasional sebagai politisi, dua periode tidak membuatnya berhenti dari karir politiknya. Awalnya TGB adalah anggota majelis tinggi Partai Demokrat, namun aktualisasinya di partai tersebut terhambat dikarenakan adanya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang merupakan putra dari pimpinan Demokrat. Dukungan TGB secara pribadi terhadap Jokowi adalah langkah yang tepat untuk dinilai dari dua hal : Pertama, Jokowi Berpeluang besar untuk menang dilihat dari berbagai survey yang dilakukan lembaga survey baik dalam dan luar negeri mengindikasikan kemenangan Pasangan calon no urut 1, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Dukungan dari berbagai partai politik yang besar juga menguatkan peta perpolitikan Pemilu 2019. TGB harus memiliki investasi politik dengan

memberikan dukungannya dengan kompensasi yang mungkin diperlukan nanti (Herbawati 2018).

Kedua, Figur TGB sebagai politisi dan Ulama yang melekat pada dirinya memunculkan opini bahwa kepemimpinan Jokowi didukung oleh ulama seperti TGB dan menghilangkan stigma pemerintah yang anti-umat Islam. TGB menerangkan bahwa pembangunan era Jokowi telah mengucurkan dana yang tak sedikit untuk membantu perekonomian umat. Hal ini juga memberikan energi positif dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Hal ini dilakukan TGB bukan hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kepentingan NTB, umat dan rakyat Indonesia pada umumnya. TGB melihat Jokowi telah membuat kemajuan di Indonesia termasuk NTB melalui program langsung pemerintah pusat dan dukungannya terhadap program pemerintah Provinsi (Herbawati 2018).

Sebagai seorang Gubernur memajukan masyarakat NTB dengan kebijakan politik yang tepat selaras dengan keberpihakan kepada umat Islam karena mayoritas warga NTB adalah umat Islam. Jika masyarakat NTB sejahtera, otomatis umat juga sejahtera hal ini sejalan dengan keilmuan dan keislamannya. TGB mengambil jalan tengah atau *manhajul wasath*, Kemaslahatan rakyat adalah yang terpenting. Pemaksaan kehendak apalagi menggunakan jalan kekerasan tidak sesuai dengan agama Islam (Herbawati 2018).

Penggunaan emosi di dalam politik praktis atau *'emotive politics'* dengan instrumen agama sangat tidak relevan, maka seharusnya menggunakan rasionalitas *'rational choice'* atau pendekatan Pilihan Rasional dengan mengedepankan kemaslahatan rakyat Indonesia dari pada kepentingan pribadi atau kelompok. Ketiga, TGB mencoba berkiprah di level nasional dan politik sebagai instrument *'wasilah'* untuk mencapai kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan.

Simpulan

Kontestasi Pemilu 2019 menjadi perhatian banyak pihak keterlibatan Tuan guru dan ulama dalam menyatakan ijtihad politiknya menjadi sorotan. Sejak Pemilu 2004 tokoh politik menjadi figur yang sangat sentral dari pada partai politik. Kedekatan secara emosional dan psikologis akan menjadi acuan bagi pemilih, pemimpin yang Islam dan Islamis sangat penting bagi negara dengan mayoritas muslim. TGB adalah representasi pemimpin muslim moderat ideal yang merangkul semua golongan. Dukungan PA 212 kepada TGB berawal dari keikutsertaan TGB dalam aksi bela agama pada Desember 2016. TGB dinilai mempunyai potensi besar karena keberhasilannya memimpin NTB selama dua periode dan mempunyai latar belakang keislaman (kesalehan) yang sangat kuat.

Dukungan Kepada TGB berakhir ketika TGB mendukung oposisi PA 212 yaitu Joko Widodo. TGB melihat akibat pemilu 2014 perpecahan di daerahnya dan Penggunaan politik identitas berupa agama telah memecah belah bangsa Indonesia. Instrumen agama yang digunakan dalam mobilisasi masa dan suara berdasarkan emosi 'emotive politics' yang merusak pondasi khazanah kebangsaan kita. Penggunaan politik identitas tidak mewakili pilihan masyarakat

muslimin pada umumnya. Hal itu hanya penggunaan exertion of power berdasarkan preferensi politik kelompok tersebut saja. TGB menyatakan dukungannya kepada Jokowi merupakan pandangan pribadinya bukan partai politik yang melatarbelakanginya.

Pindahannya dukungan TGB didasari oleh pilihan rasional dengan pertimbangan kemaslahatan umat. Jika di Deskripsikan ada tiga hal dari latar belakang Pilihan rasional tersebut yaitu mutual interest, shadow of the future dan number of actors (Axelrod dan Keohane 1985). Singkatnya TGB melihat Jokowi Berpeluang besar untuk menang, maka investasi politik harus dilakukan.

TGB ingin menghilangkan stigma negative Jokowi yang anti-umat dan memberikan energi positif dalam kontestasi pemilihan presiden 2019. Kemaslahan rakyat adalah yang terpenting, penggunaan emosi atau 'emotive politics' dengan instrumen agama sangat tidak relevan, maka seharusnya menggunakan rasionalitas 'rational choice'. Terakhir, TGB mencoba berkiprah di level nasional dan politik sebagai instrument 'wasilah' untuk mencapai kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai keadilan..[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsalam, Husein. 2018. "TGB Ungkap Alasan Mendasar Putuskan Keluar dari Demokrat -." *Tirto.ID*. <https://tirto.id/tgb-ungkap-alasan-mendasar-putusan-keluar-dari-demokrat-cPYY> (Februari 27, 2020).
- Afala, Laode Machdani. 2018. *Politik Identitas di Indonesia*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Andry, Haryanto. 2018. "PA 212 Coret Nama Tuan Guru Bajang dari Daftar Capres." *liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3579677/pa-212-coret-nama-tuan-guru-bajang-dari-daftar-capres>.

- Axelrod, Robert, dan Robert O. Keohane. 1985. "Achieving Cooperation under Anarchy: Strategies and Institutions." *World Politics*.
- CNN Indonesia. 2018. "PA 212 Serahkan Nama Capres ke Prabowo dan Amien di Mekkah." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180602164446-20-302927/pa-212-serahkan-nama-capres-ke-prabowo-dan-amien-di-mekkah> (Februari 24, 2020).
- Deutch, Karl W. 1961. "Social Mobilization and Political Development." *American Political Science, Review* 55(03): 493–514.
- Dian Maharani, Deytri Robekka Aritonang. 2014. "Ini Hasil Resmi Rekapitulasi Suara Pilpres 2014 Halaman all -." *22 Juli: News Nasional*. <https://nasional.kompas.com/read/2014/07/22/20574751/Ini.Hasil.Resmi.Rekapitulasi.Suara.Pilpres.2014?page=all> (Februari 27, 2020).
- Falahudin A, Fakhri. 2019. *Pengaruh Gerakan Islam Indonesia (Aksi 212) Terhadap Pemilu Presiden 2019*.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of cultures*. New York: New York Basis book.
- Herbawati, Neneng. 2018. *TGBNomics*. Jakarta: IGiCo Advisory.
- Horowitz, Donald L. 1985. *Ethnic Groups in Conflict*. Berkeley and Los Angeles University of California Press.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. ed. Robert M. Z Lawang. Jakarta: Gramedia.
- Klinken, Gerry van. 2007. *Communal Violence and Democratization in Indonesia Small town wars*. Madison Ave, New York, NY 10016: Routledge.
- KPUD NTB. 2014. "HASIL REKAPITULASI TINGKAT PROVINSI: DPT PEMILU 2014 PROVINSI NTB KEMBALI BERUBAH." <https://kpud-ntbprov.go.id/berita-hasil-rekapitulasi-tingkat-provinsi-dpt-pemilu-2014-provinsi-ntb-kembali-berubah.html> (Februari 27, 2020).
- Luria, Aleksander Romanovich. 1932. *The nature of human conflicts or emotion, Conflict and will*. New York: Grove Press.
- Majdi, Zainul. 2009. *Tuan Guru Bajang: Berpolitik dengan Dakwah dan Berdakwah dengan Politik*. Jawa Timur: Kaisamedia.
- Media Survei Nasional. 2018. *Membaca Peta Kompetisi Jelang Pilpres 2019*. Jakarta. www.median.or.id ANGGOTAAROPI (Maret 1, 2020).

- Nastiti, Aulia, dan Sari Ratri. 2018. "Emotive Politics." *Contemporary Southeast Asia*.
- Prastivi, Devira. 2019. "6 Hasil Survei Terbaru Elektabilitas Jokowi Vs Prabowo Jelang Pilpres 2019." *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/pilpres/read/3933017/6-hasil-survei-terbaru-elektabilitas-jokowi-vs-prabowo-jelang-pilpres-2019> (Februari 27, 2020).
- SMRC. 2018. *Mahfud MD dan Sri Mulyani Indrawati Konsisten Masuk 5 Besar Tokoh dari Penilaian Elite, Opinion Leader, dan Massa Pemilih Nasional*. Jakarta. <https://saifulmujani.com/mahfud-md-dan-sri-mulyani-indrawati-konsisten-masuk-5-besar-tokoh-dari-penilaian-elite-opinion-leader-dan-massa-pemilih-nasional/> (Februari 24, 2020).
- Wahyudi, Agus. 2018. *Buku Tuan Guru Bajang; Santri Membangun Negeri*. Yogyakarta: Media Pressindo Yogyakarta.
- Yogi Setya Permana, Pandu Yuhsina Adaba Septi Satriani Irine Hiraswari Gayatri. 2010. *Dinamika Peran Elite Lokal dalam Pilkada Bima 2010*. ed. Pandu Yuhsina Adaba Septi Satriani. Yogyakarta: Andi Offset.
- Zamharir, Muhammad Hari. 2004. *Agama dan Negara: Analisis Kritis Pemikiran Politik Nurcholish Madjid*. Raja Grafindo Persada.